

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA  
DI DESA UMEANYAR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN  
BULELENG**

OLEH : I Ketut Mei Ardika<sup>1</sup> dan Putu Agustana<sup>2</sup>

**ABSTRAKSI**

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam menunjang perkembangan pembangunan di Bali. Desa Umeanyar merupakan salah satu desa yang menjadikan pariwisata sebagai andalan dalam membangun desanya. Untuk itu dalam pengelolaannya mensinergikan kebijakan antara desa dinas dengan desa adat, dengan menjadikan panorama alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kebijakan pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar merupakan sinergi antara kebijakan desa dinas dan desa adat. Kedua lembaga tersebut berusaha memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya pariwisata yang dimiliki. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung pariwisata diantaranya adalah objek-objek wisata yang menarik dengan keindahan alam yang ada, proses perijinan yang tidak rumit serta tersedianya sarana fasilitas pariwisata yang memadai. Faktor penghambatnya adalah adanya pembagian yang tidak adil terhadap hasil pungutan retribusi pariwisata yang dirasakan oleh desa dinas. Juga kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta kurangnya promosi dan pemasaran terhadap objek-objek wisata yang ada.

Selanjutnya, perkembangan pariwisata di desa Umeanyar berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Secara ekonomi terjadi peningkatan taraf kehidupan bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata. Terjadinya perkawinan transnasional antara warga desa Umeanyar dengan warga negara asing. Juga adanya pembagian sembako kepada para lansia setiap bulannya dan adanya pemberian les bahasa Inggris oleh tamu asing kepada anak-anak sekolah.

**Kata kunci : kebijakan, pariwisata**

---

<sup>1</sup> Staf Desa Umeanyar email : [meiardika99@gmail.com](mailto:meiardika99@gmail.com)

<sup>2</sup> Staf Pengajar Universitas Panji Sakti , email [putu.agustana@unipas.ac.id](mailto:putu.agustana@unipas.ac.id)

## **1. Pendahuluan**

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah lebih diprioritaskan pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Secara teori, implementasi dapat dikatakan sebagai sesuatu untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian ( Masmanian dan Sabatier dalam Wahab, 2008 : 51 )

Untuk pemerintah Provinsi Bali, yang sangat bertumpu pada potensi pariwisata, maka kebijakan pembangunan sejatinya lebih banyak diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata yang menjadi andalan bagi provinsi Bali untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Di samping sektor-sektor lainnya yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan, misalnya sektor pertanian dan perkebunan.

Salah satu sektor yang menjadi andalan dalam pembangunan di Bali dan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara umum adalah sektor pariwisata. Kegiatan pariwisata selain mendatangkan sumber pendapatan utama di Bali, juga dapat menjadi ancaman serius bagi sebagian orang, dan lingkungan, termasuk bagi wisatawan asing yang mencintai keaslian alam, kualitas lingkungan hidup, nilai-nilai moral, sosial budaya dan keberlanjutannya. Kegiatan ekonomi pariwisata telah mendorong transformasi lahan secara besar-besaran, pengalihan fungsi lahan-lahan historis, sosio-kultural yang sangat unik, menjadi sentra-sentra bisnis pariwisata. Transformasi kawasan lindung dan ekologis menjadi sentra-sentra bisnis, atau perluasan sentra bisnis. Beban lingkungan melampaui daya dukung pada berbagai kawasan, akibat pemusatan kegiatan, transformasi lahan kawasan, transformasi sentra ekosistem dan mobilitas penduduk luar kota ke kota maupun luar Bali ke Bali, yang cenderung berdomisili terpusat pada sentra-sentra kegiatan ekonomi (Wyasa,2003:4). Dengan demikian akan terjadi kepadatan penduduk di wilayah pengembangan pariwisata, yang dapat berpengaruh pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, pemusatan kegiatan ekonomi di pusat pariwisata, yang pada akhirnya terjadi ketimpangan ekonomi antara kota (pusat pariwisata) dengan desa atau wilayah-wilayah yang ada di Bali.

Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara

untuk berbagai tujuan selain untuk mencari nafkah (Ardika,2002: 1). Kegiatan berwisata merupakan hak asasi seseorang yang perlu dihargai sebagaimana dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Right*. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan wisata diperlukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpadu oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.

Falsafah pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa sumber daya alam maupun lingkungan geografis. Konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali disebut dengan "*Tri Hita Karana*". Hal ini didukung oleh pendapat Erawan (2006),menekankan agar pariwisata kembali dibangun dengan menjunjung konsep *Tri Hita Karana*, yaitu :

1. *Parahyangan*, yaitu hubungan manusia dengan Ida Sanghyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa dengan baik
2. *Pawongan*, dimana hubungan antar manusia terjadi keharmonisan
3. *Pelemahan*, yakni hubungan manusia dengan alam sekitarnya dalam kondisi lestari dan baik.

Dalam pengembangan pariwisata khususnya dalam pengelolaan suatu kawasan wisata atau objek wisata, Pemerintah Provinsi Bali lebih mengedepankan peranan desa adat . Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat Pulau Bali tidak dapat dipisahkan dari aktifitas adat dan keagamaan khususnya agama Hindu. Di samping itu keberadaan desa adat dinilai lebih mampu untuk membendung serta mencegah dampak-dampak negatif dari adanya pariwisata di Bali, karena desa adat memiliki *awig-awig* (peraturan-peraturan) yang mengatur kehidupan warganya dan sangat dipatuhi oleh *krama* desa adat.

Desa Umeanyar sebagai salah satu desa di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sejak sekitar tahun 1997 mulai mengembangkan sektor pariwisata berdasarkan potensi keindahan alam perbukitan dan pantai yang dimilikinya. Sejak saat itu berbagai fasilitas pariwisata khususnya hotel dan villa mulai dibangun oleh para investor di Desa Umeanyar. Sampai saat ini fasilitas pariwisata yang ada di

Desa Umeanyar adalah : hotel sebanyak 5 unit, villa sebanyak 26 unit dan Pondok Wisata sebanyak 3 unit.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan sehubungan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar, salah satunya adalah masalah sampah di pantai saat musim hujan. Pantai di Desa Umeanyar yang sebenarnya menjadi lokasi andalan pariwisata, setiap musim hujan tiba selalu dipenuhi dengan sampah yang tentunya sangat mengganggu kebersihan dan kenyamanan para wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai Desa Umeanyar, baik dengan berjalan-jalan menyusuri pantai, berenang maupun melakukan *diving* di pantai Desa Umeanyar.

Permasalahan lain berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar adalah masalah pembagian hasil retribusi pariwisata antara desa dinas dengan desa adat. Retribusi pariwisata di Desa Umeanyar selama ini dipungut dan dikelola oleh desa adat, sedangkan desa dinas hanya mendapatkan bagian sebanyak Rp.3.000.000,- pertahun ( dari pendapatan pertahun sekitar Rp.37.000.000,- ). Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dari sekitar Rp.37.000.000,- pendapatan pertahun dari pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar, sebanyak Rp.3.000.000,- diberikan kepada desa dinas. Kemudian masing-masing subak ( ada 3 subak ) mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitan dengan kebijakan pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt, peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian : “Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan dalam pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ? ; 2) Bagaimanakah kaitan perkembangan pariwisata dengan kehidupan masyarakat Desa Umeanyar kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012 : 32 ), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Perbekel Desa Umeanyar beserta perangkatnya, Klian Desa Adat Umeanyar, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat pelaku pariwisata di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah. Penunjukkan informan tidak dibatasi, disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian penunjukkan informan dihentikan ketika semua data dan informasi yang dibutuhkan sudah didapatkan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Pengelolaan pariwisata, yang meliputi : a) kebijakan desa dinas dan desa pakraman; b) sumber daya pariwisata, dan c) faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pariwisata.
2. Kaitan perkembangan pariwisata dengan kehidupan masyarakat Desa Umeanyar, yang meliputi : kaitan ekonomi, sosial dan budaya.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan dalam pengelolaan pariwisata. Lokasi ini dipilih karena secara geografis wilayah Desa Umeanyar mudah dijangkau, serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini cukup tersedia.

Selanjutnya pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian dengan tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi ( Sugiyono, 2014 )

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Desa Umeanyar**

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan ( Winarno, 2010 ). Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk mempengaruhi dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Sehubungan dengan kebijakan pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar, ada sinergi antara Desa Dinas dan Desa Adat. Desa Dinas dan Desa Adat memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan pariwisata di Desa Umeanyar.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yang berhasil diwawancarai, didukung dengan hasil observasi secara langsung di lokasi penelitian serta dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa kebijakan pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar merupakan sinergi dari 2 ( dua ) lembaga yang ada di desa yakni desa dinas dan desa adat. Semua itu sudah berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang dihasilkan lewat *paruman* desa. Mereka juga memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki yakni hansip dari pihak desa dinas dan *pecalang* dari pihak desa adat untuk menjaga objek-objek dan fasilitas pariwisata yang ada di Desa Umeanyar. Hal ini memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn ( Subarsono, 2012 : 99 ), bahwa ada lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yakni : 1) standar dan sasaran kebijakan; 2) sumberdaya; 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4) karakteristik agen pelaksana; dan 5) kondisi sosial ekonomi dan politik.

Selain itu, dalam pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar, desa dinas bersama-sama dengan desa adat menetapkan kebijakan dalam upaya penyelamatan lingkungan khususnya dalam penanganan sampah, baik sampah rumah tangga, sampah dari warung-warung, maupun sampah dari hotel atau villa. Dalam hal ini pihak rumah tangga, warung dan hotel atau villa dikenakan pungutan untuk biaya penanganan sampah. Sesuai dengan catatan atau dokumen yang ada, besarnya pungutan untuk penanganan sampah adalah sebagai berikut :

- Rumah Tangga : Rp.10.000,00 / bulan
- Warung/Restoran : Rp. 25.000,00 / bulan
- Hotel / Villa : Rp.150.000,00 – Rp.300.000,00 / bulan ( tergantung besar kecilnya hotel / villa )

Berdasarkan data sekunder berupa dokumen serta hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, desa Umeanyar memiliki sejumlah sumber daya pariwisata berupa objek dan daya tarik wisata yang menjadi andalan desa Umeanyar untuk menarik kedatangan wisatawan untuk datang ke desa Umeanyar. Objek dan daya tarik wisata tersebut terbagi dalam beberapa jenis objek wisata seperti wisata budaya, wisata religi, wisata alam, dan wisata tirta. Setiap titik tujuan objek wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan, didukung dengan hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa sumber daya pariwisata yang dimiliki oleh desa Umeanyar yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia pelaku pariwisata memang sangat berperan dalam kebijakan pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar. Hal ini sesuai dengan pandangan Edward III ( Subarsono, 2012 : 90 ) bahwa sumber daya menjadi salah satu dari empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Juga seperti pendapat Merille S. Grindle ( Subarsono, 2012 : 93 ), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan salah satunya mencakup apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sampai saat ini, di desa Umeanyar terdapat 35 ( tiga puluh lima ) usaha pariwisata yang terdiri dari 26 villa, 5 hotel, 3 pondok wisata, dan 1 restoran yang tersebar di dua dusun yang ada di desa Umeanyar yakni Dusun Pawitra dan Dusun Kundalini.

Potensi objek wisata yang menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan di desa Umeanyar merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar. Juga adanya keramah tamahan masyarakat serta sinergi yang terjalin baik antara desa dinas dengan desa adat. Terbukanya lebar-lebar

kesempatan bagi para pelaku pariwisata untuk membangun fasilitas pariwisata di desa Umeanyar dengan tidak terlalu ketatnya perijinan yang diberikan oleh desa dinas menjadikan perkembangan yang baik bagi pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan , yakni dari desa dinas, desa adat, BPD, dan pelaku pariwisata, didukung dengan pantauan langsung di lokasi penelitian khususnya di Kantor Perbekel Desa Umeanyar serta bukti-bukti dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa daya tarik wisata, kemudahan dalam akses perijinan serta tersedianya sarana dan fasilitas pariwisata yang memadai menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kodhyat ( Suprpta, 2003 : 37 ) bahwa perkembangan pariwisata disuatu daerah tujuan wisata atau *tourist destination* sangat ditentukan oleh faktor : 1) daya tarik wisata ( *tourist attractions*); 2) kemudahan perjalanan atau aksesibilitas ke daerah tujuan wisata yang bersangkutan; dan 3) sarana dan fasilitas yang diperlukan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar, salah satunya adalah adanya sistem pembagian hasil retribusi dari pengelolaan pariwisata yang dirasa kurang adil khususnya oleh pihak desa dinas. Selama ini retribusi pariwisata di desa Umeanyar dipungut dan dikumpulkan oleh desa adat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, setiap tahunnya jumlah retribusi pariwisata yang berhasil dikumpulkan adalah rata-rata sebanyak Rp. 37.000.000,00 ( tiga puluh tujuh juta rupiah ). Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) diberikan kepada desa dinas. Kemudian Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) diberikan kepada subak yang ada di desa Umeanyar ( ada 3 subak di desa Umeanyar ). Jadi sisanya sebanyak Rp.31.000.000,00 ( tiga puluh satu juta rupiah ) masuk ke kas desa adat. Hal tersebut sering dikeluhkan oleh pihak desa dinas.

Selain masalah pembagian hasil pungutan retribusi pariwisata yang oleh desa dinas dirasa kurang adil, hal lain yang menjadi penghambat dalam pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar adalah kurangnya kesadaran masyarakat terutama para nelayan didalam mengembangkan wisata bahari.



Dari hal-hal yang disampaikan oleh informan terkait kurang sadarnya masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan pariwisata dan berpotensi menjadi penghambat pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar, didukung dengan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yakni di pantai desa Umeanyar, dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya para nelayan tersebut kurang menyadari dan kurang memahami tentang adanya aturan atau larangan memancing ditempat tersebut. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Anderson ( Islamy, 2010 ) bahwa dalam implementasi kebijakan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah faktor-faktor penyebab mengapa orang tidak mematuhi atau melaksanakan suatu kebijakan publik, yang diantaranya adalah adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum. Dalam hal ini masyarakat akan melihat manfaat atau kerugian yang mereka peroleh dari diterapkannya suatu kebijakan.

Faktor penghambat lainnya dari pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar adalah masih minimnya warga desa Umeanyar yang memiliki kemampuan berbahasa asing, sehingga ketika mereka bertemu dengan wisatawan asing dan ditanya sesuatu oleh wisatawan tersebut tidak bisa menjawab. Juga masalah promosi dan pemasaran objek-objek wisata yang dirasa sampai saat ini masih kurang.

### **3.2. Kaitan Perkembangan Pariwisata dengan Kehidupan Masyarakat Desa Umeanyar**

Dijadikannya suatu daerah sebagai kawasan wisata atau tempat kunjungan bagi wisatawan, akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada daerah tersebut. Perubahan-perubahan tersebut terjadi sebagai dampak dari adanya kehadiran orang-orang dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri yang banyak berkunjung atau bahkan menetap untuk beberapa waktu ditempat tersebut. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan lingkungan alam, bahkan terpenting adalah dampak dari adanya perkembangan pariwisata tersebut adalah terjadinya perubahan dalam pola kehidupan dan tingkah laku dari masyarakat yang tinggal di daerah kawasan wisata.

Pariwisata di Desa Umeanyar yang sudah berkembang sejak tahun 1997 memiliki kaitan tersendiri dengan kehidupan masyarakat desa Umeanyar. Pariwisata di desa Umeanyar yang perkembangannya ditandai dengan semakin banyaknya berdiri fasilitas pariwisata seperti hotel, villa, pondok wisata dan fasilitas lainnya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa Umeanyar.

Yang pertama tentunya secara ekonomi perkembangan pariwisata di desa Umeanyar memberi nafkah bagi warga desa Umeanyar yang bekerja di sektor pariwisata. Sampai saat ini, tercatat ada sekitar 75 orang warga desa Umeanyar yang bekerja di sektor pariwisata. Mereka umumnya bekerja sebagai penjaga villa, pekerja hotel dan pondok wisata, pemandu wisata, pemilik warung di objek wisata, serta pedagang souvenir . Mereka semuanya tentu mengandalkan penghasilan dan menafkahi keluarganya dari hasil bekerja di sektor pariwisata tersebut.

Lahan pekerjaan lain yang juga bisa di tekuni oleh warga desa Umeanyar sebagai dampak dari perkembangan wisata di Desa Umeanyar adalah beberapa anak-anak menjadi pedagang acung dengan menjajakan berbagai souvenir kepada wisatawan khususnya wisatawan yang sedang menikmati keindahan panorama pantai desa Umeanyar. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak usia sekolah tersebut pada sore hari setelah mereka pulang sekolah. Kalau hari libur baru mereka menjajakan barang dagangannya dari pagi sampai sore.

Selain kaitan atau dampak secara ekonomi yang terjadi karena adanya perkembangan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat desa Umeanyar seperti yang telah diuraikan di atas, dampak sosial dan budaya juga terjadi akibat adanya perkembangan pariwisata tersebut. Salah satunya yang paling menonjol adalah adanya perkawinan transnasional antara perempuan etnis Bali dengan laki-laki mancanegara. Atau perkawinan antara laki-laki etnis Bali dengan perempuan mancanegara.

Interaksi yang intensif antara wisatawan mancanegara dengan penduduk lokal khususnya yang berasal dari desa Umeanyar, pada akhirnya menyebabkan terjadinya perkawinan antara warga desa Umeanyar dengan warga negara asing.

Hal ini disebabkan karena di wilayah desa Umeanyar banyak dijumpai villa yang banyak dihuni oleh wisatawan mancanegara. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan tersebut memang didasari oleh adanya keinginan untuk menyalurkan rasa cinta kasih yang ada pada diri mereka.

Dalam hubungannya dengan pengesahan perkawinan antar bangsa tersebut, Desa Adat Umeanyar memiliki ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan secara adat yang telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat. Di dalamnya dimuat ketentuan bahwa pasangan perempuan etnis Bali yang akan menikah dengan laki-laki asing harus memenuhi persyaratan, yakni 1. memberi laporan kepada Kelian Desa Adat tentang rencana perkawinan mereka; 2. selanjutnya pihak laki-laki harus menunjukkan surat tentang status yang dikeluarkan oleh Konsulat negaranya ; 3. pihak laki-laki menyatakan kesediaannya untuk melangsungkan upacara *sudiwidani* yakni sebuah upacara peralihan dari agama asal ke agama Hindu.

Dalam konteks adanya perkawinan transnasional antara perempuan etnis Bali dengan laki-laki mancanegara, terdapat stereotip yang melekat terhadap kehadiran orang asing dan perempuan lokal yang dekat dengan orang asing. Stereotip perempuan lokal adalah “hanya perempuan nakal” saja yang mau menjalin hubungan dengan laki-laki asing.

Stereotip yang bernada negatif terhadap hubungan khusus yang dijalin oleh perempuan lokal dengan orang asing dilandasi anggapan bahwa orang asing banyak duit, suka perempuan muda, dan sebagainya. Anggapan ini berakibat munculnya pandangan bahwa perempuan lokal mau dekat dengan laki-laki asing karena motif ekonomi. Mereka dicap sebagai “cewek matre”. Di samping itu beda usia yang sangat jauh ( 15 – 30 tahun ) berakibat munculnya pandangan bahwa hanya karena dollar dia mau pacaran atau menikah walau pasangannya sudah tua.

Berdasarkan pandangan masyarakat , terdapat dua versi / model tentang pacaran dengan tamu asing. Pertama, ada perempuan yang dianggap benar-benar serius dalam membina hubungan ; kedua, mereka yang berhubungan karena motif uang, sex dan gengsi.

Kaitan atau dampak lain dari adanya perkembangan pariwisata di desa Umeanyar, setiap bulannya para pengusaha pariwisata yang membuka usahanya di desa Umeanyar memberikan sumbangan sembako kepada para lansia yang ada di desa Umeanyar. Juga adanya kegiatan les bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah yang dilakukan oleh wisatawan asing yang kebetulan menetap cukup lama di desa Umeanyar. Les bahasa Inggris tersebut biasanya dilaksanakan setiap hari Minggu sore.

Dari hasil wawancara dengan para informan, didukung dengan hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dapat ditemukan bahwa perkembangan pariwisata di desa Umeanyar memberikan dampak secara ekonomi dan sosial budaya kepada kehidupan masyarakat desa Umeanyar. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Islamy ( 2010 ) bahwa dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan.

## **4. Penutup**

### **4.1 Simpulan**

Dari hal-hal yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu :

1. Kebijakan pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar merupakan sinergi antara kebijakan desa dinas dan desa adat yang saling mendukung dan saling menguatkan. Perkembangan pariwisata di desa Umeanyar dapat berkembang dengan baik sampai saat itu karena adanya sumber daya yang memadai. Selanjutnya adanya daya tarik wisata, akses perijinan yang tidak terlalu rumit, serta fasilitas yang memadai menjadi faktor pendukung perkembangan pariwisata di desa Umeanyar. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang adilnya pembagian hasil pungutan redistribusi pariwisata yang dirasakan oleh desa dinas. Juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait pariwisata itu sendiri, serta kurangnya promosi dan pemasaran terhadap objek-objek wisata yang menjadi andalan desa Umeanyar.

2. Kaitan perkembangan pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa Umeanyar dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan sebagian masyarakat desa Umeanyar khususnya yang bekerja di sektor pariwisata. Juga adanya perkawinan transnasional antara warga desa Umeanyar dengan warga negara asing. Selanjutnya adanya pemberian sembako kepada para lansia setiap bulan dan les bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah yang diberikan oleh wisatawan asing yang menetap cukup lama di desa Umeanyar terjadi karena perkembangan pariwisata pariwisata itu sendiri.

#### **4.2 Saran-saran**

1. Desa Dinas dan Desa Adat hendaknya selalu bersinergi dan bekerja sama dengan baik dalam membuat kebijakan-kebijakan supaya pengelolaan pariwisata di desa Umeanyar terus dapat berjalan baik serta mampu memberikan manfaat yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi hendaknya segera dibicarakan dan dicari solusinya supaya pariwisata di desa Umeanyar terus maju dan berkembang.
2. Terhadap pengaruh yang ditimbulkan kepada masyarakat terkait perkembangan pariwisata di desa Umeanyar, hendaknya disikapi bersama secara bijak dan diupayakan untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif yang bisa merusak kehidupan masyarakat dan masa depan generasi muda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardika, I Gede, 2002. *Konsepsi Pembangunan Kepariwisata Indonesia*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia : Jakarta
- Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
- Erawan, Puja, 2006. "Bali Berwawasan Pariwisata Budaya" *Makalah*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng : Singaraja
- Islamy, Irfan, 2010, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta

- Subarsono, AG. 2012, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabet : Bandung
- Suprpta, I Nyoman, 2003. *Implementasi Kebijakan Desa Adat Dalam Pariwisata* (Studi Kasus di Desa Adat Kalibukbuk Kawasan Wisata Lovina Kabupaten Buleleng), Tesis S2 Universitas Jember.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wyasa P., Ida Bagus, dkk, 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*, Aditama : Bandung